

Sinopsis

Sebuah kritik terhadap suatu sistem pemerintahan merupakan input yang sama pentingnya dengan saran atau dukungan yang berasal dari rakyat kepada pemerintahnya. Kritik sejatinya merupakan input yang sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana penilaian, tanggapan dan harapan rakyat atas kinerja yang ditunjukkan oleh para pemimpinnya. Sayangnya, pemerintah Indonesia tidak selalu bersikap bijak dalam menanggapi kritikan-kritikan yang dialamatkan kepada mereka. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terdapat sebuah kecenderungan bahwa otoritas pemerintah di berbagai level seringkali memproteksi diri dari segala serangan kritik dari masyarakat dengan mengatasnamakan kebijakan pemerintah sebagai pembenaran atas tindakan-tindakan represif yang mereka ambil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi dalam menyikapi kritikan, terutama yang tertuang dalam lagu-lagu yang diciptakan/dibawakan oleh seniman-seniman musik.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari data dokumenter yaitu dokumentasi pemberitaan media cetak (surat kabar) dan media elektronik (internet) mengenai sejarah dan kronologis kasus-kasus yang menimpa beberapa seniman musik berkaitan dengan kritik dalam lirik-lirik mereka, serta studi pustaka yang digunakan untuk mencari relevansi pengkajian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kebijakan normatif, yaitu aspek analisis kebijakan yang ditujukan kearah penciptaan, kritik, dan komunikasi klaim pengetahuan tentang nilai kebijakan untuk generasi masa lalu, sekarang, dan masa mendatang.

Dari data-data yang telah diinterpretasikan berdasarkan teori-teori yang ada, diperoleh hasil bahwa kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada Orde Lama dalam menyikapi kritik seniman musik bersifat otoriter. Hal ini dapat dilihat dari pengenaan sanksi/hukuman yang dipaksakan kepada seniman musik tanpa melalui prosedur-prosedur yang seharusnya. Kebijakan pemerintah Orde Baru bersifat semi otoriter karena meskipun masih terwujud dalam tindakan represif aparat pemerintah, namun sanksi/hukuman yang dikenakan tidak seekstrim pada orde sebelumnya, hanya berupa pencekalan-pencekalan. Sedangkan kebijakan pemerintah pada Orde Reformasi lebih bersifat demokratis. Kondisi ini ditunjukkan oleh munculnya fakta bahwa wacana pencekalan digulirkan oleh pemerintah terhadap seniman musik atas lirik bermuatan kritik tidak bisa begitu saja diteruskan, melainkan harus melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku. Opini publik yang sudah lebih kritis dalam merespon keputusan-keputusan pemerintah juga berpengaruh besar terhadap diurungkannya wacana